

## Proses Collaborative Governance dalam program Puspaga Balai RW di Kota Surabaya

Sakti Sigap Prakosa<sup>1</sup>, Bagus Nuari Harmawan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Adminitrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

saktisigappprakosa86@gmail.com<sup>1</sup>, bagusnuari.adneg@upnjatim.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*Puspaga, an abbreviation for Family Planning and Family Welfare Service Center, is a counseling service program that involves various community groups. This program integrates the concept of collaborative governance at the RW hall level, involving residents, community leaders, local government and related institutions. This collaboration aims to increase the effectiveness and sustainability of the Puspaga program amidst the changing paradigm of active community participation in development. RW Hall, as a center for social and cultural activities, is key in creating an environment that supports and understands community needs. Collaboration between RW halls, local government and other institutions is expected to create a holistic and sustainable service model.*

**Keywords:** *puspaga, collaborative governance, rw hall, community participation, program sustainability, family welfare*

### ABSTRAK

Puspaga, singkatan dari Pusat Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga, merupakan program layanan konseling yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Program ini mengintegrasikan konsep collaborative governance di tingkat balai RW, melibatkan warga, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, dan lembaga terkait. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program Puspaga di tengah perubahan paradigma partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Balai RW, sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memahami kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara balai RW, pemerintah setempat, dan lembaga lain diharapkan menciptakan model pelayanan holistik dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** *puspaga, collaborative governance, balai rw, partisipasi masyarakat, keberlanjutan program, kesejahteraan keluarga*

### PENDAHULUAN

Puspaga, singkatan dari Pusat Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga, merupakan sebuah program layanan konseling atau konsultasi yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada berbagai kelompok masyarakat, seperti anak, remaja, keluarga, anak berkebutuhan khusus, dan calon pengantin (catin). Program ini memiliki cakupan yang luas, melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan reproduksi, hingga kesejahteraan keluarga. Puspaga secara aktif melakukan sosialisasi, edukasi, dan penyediaan informasi sebagai bentuk fasilitas yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam isu-isu tersebut.

Salah satu inovasi dalam pelaksanaan program Puspaga adalah pengintegrasian konsep collaborative governance antar aktor, terutama dalam konteks balai RW (Rukun Warga). Collaborative governance merupakan suatu

pendekatan yang mendorong kerja sama antara berbagai pihak terkait dalam pengambilan keputusan dan implementasi program. Dalam konteks Puspaga di balai RW, kolaborasi ini melibatkan peran aktif warga, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terkait program tersebut.

Adanya collaborative governance dalam program Puspaga di balai RW memiliki latar belakang yang kuat dalam upaya meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan paradigma dalam pelaksanaan program pembangunan di Indonesia, di mana pemerintah semakin mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program yang berdampak pada kehidupan mereka.

Keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya dianggap sebagai bentuk partisipasi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi program. Oleh karena itu, melibatkan berbagai aktor dalam proses kolaboratif menjadi langkah yang tepat, terutama di tingkat RW yang merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan setempat.

Balai RW sebagai tempat tinggal bagi masyarakat setempat memiliki potensi besar sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya. Dengan memanfaatkan potensi ini, program Puspaga dapat meresap lebih dalam ke masyarakat, menjadikan balai RW bukan hanya sebagai tempat administratif, tetapi juga sebagai pusat pelayanan yang berdaya guna. Melibatkan aktor-aktor lokal, seperti tokoh masyarakat dan pemuda, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memahami kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Kolaborasi antara balai RW, pemerintah setempat, dan lembaga terkait lainnya dapat menciptakan sinergi yang kuat. Misalnya, dalam hal pengorganisasian kegiatan sosialisasi Puspaga, balai RW dapat menjadi lokasi yang strategis, sedangkan pemerintah setempat dapat memberikan dukungan logistik dan sumber daya lainnya. Tokoh masyarakat dan pemuda, di sisi lain, dapat membantu menyampaikan informasi dengan cara yang lebih akrab dan relevan bagi masyarakat.

Dengan adanya collaborative governance dalam program Puspaga di balai RW, diharapkan dapat tercipta suatu model pelayanan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Penerapan pendekatan ini di tingkat lokal tidak hanya memberikan manfaat dalam penyediaan layanan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memperkuat keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan, menciptakan dampak positif yang lebih luas pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## TINJAUAN LITERATUR

### *Collaborative governance*

Pemerintah mengakui pentingnya melibatkan berbagai aktor dalam proses tata kelola atau governance untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam kerangka ini, Abidin dan rekan-rekannya (Paripurnawaty, 2021) mendefinisikan aktor-aktor yang dapat terlibat sebagai pihak swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, konsep *collaborative governance* dianggap

sebagai pendekatan yang relevan dan perlu diterapkan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Ansell dan Gash, seperti yang dijelaskan oleh Paripurnawaty (2021), mengartikan collaborative governance sebagai suatu cara penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan para pemangku kepentingan di luar negara, dengan menggunakan konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif untuk menciptakan atau melaksanakan kebijakan publik dan program-program publik.

Konsep collaborative governance menekankan pentingnya kerja sama antara aktor publik dan aktor privat (bisnis) dalam menciptakan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ansell dan Gash menjelaskan bahwa collaborative governance adalah tipe tata kelola di mana aktor publik dan privat bekerja secara kolektif dengan cara dan proses tertentu untuk membentuk undang-undang dan aturan yang berhubungan dengan penyediaan barang publik. Ini mengindikasikan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah dan organisasi swasta atau bisnis bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

Adapun empat variabel dalam collaborative governance yang diidentifikasi oleh Ansell dan Gash, seperti yang dikutip oleh Paripurnawaty (2021), melibatkan kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Proses kolaboratif dianggap sebagai inti dari collaborative governance, melibatkan tahapan seperti dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara.

Definisi lebih luas collaborative governance oleh Emerson dan Nabatchi (Arrozaaq, 2016) menyebutkannya sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen publik yang melibatkan aktor secara konstruktif dari berbagai lapisan masyarakat, swasta, dan sipil. Ini dilakukan untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak dapat dicapai jika hanya dilakukan oleh satu pihak. Dalam hal ini, Donahue dan Zeckhauser serta Holzer menyatakan bahwa collaborative governance adalah kondisi di mana pemerintah dan swasta berusaha mencapai tujuan bersama untuk kepentingan masyarakat.

Proses tata kelola kolaboratif, seperti dijelaskan oleh Ansell dan Gash, memiliki berbagai tahapan, di mana kolaborasi berkembang secara bertahap. Model tersebut mencakup fase prenegosiasi, fase negosiasi, dan fase implementasi, atau dalam kata lain, tahapan identifikasi hambatan dan peluang, perdebatan strategi untuk pengaruh, dan perencanaan tindakan kolaboratif. Penilaian collaborative governance, yang diperinci oleh Ratner (2012) dalam Irawan (2017), mencakup dimensi-dimensi seperti perwakilan pemangku kepentingan, distribusi wewenang, dan mekanisme akuntabilitas.

Proses collaborative governance ini memerlukan penilaian yang bertujuan untuk memahami struktur dan pembuatan keputusan dalam suatu sektor, serta mengeksplorasi peran penting faktor kelembagaan dalam tata kelola. Pendekatan ini memberikan gambaran tentang karakteristik pengaturan tata kelola kolaboratif, yang mencakup representasi pemangku kepentingan, distribusi wewenang, dan mekanisme akuntabilitas.

## Program Puspaga Balai RW

Program Puspaga Balai RW merupakan inisiatif yang memberikan layanan konseling dan konsultasi bagi keluarga, anak-anak, remaja, bahkan pasangan calon pengantin. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Pusat Pembelajaran Keluarga yang diluncurkan oleh pemerintah Surabaya dengan tujuan mempromosikan lingkungan yang sehat dan aman bagi anak-anak dan keluarga. Puspaga Balai RW hadir di berbagai Balai RW (pusat komunitas lingkungan) di seluruh Surabaya, menawarkan layanan seperti kelas-kelas parenting, konseling, dan edukasi mengenai berbagai topik. Selain itu, program ini menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di Surabaya untuk memberikan pelatihan bagi mahasiswa yang ingin menjadi konselor atau relawan untuk Puspaga Balai RW.

Pusat Pembelajaran Keluarga di Surabaya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat sekitar. Puspaga Balai RW menjadi salah satu elemen kunci dalam mencapai tujuan ini dengan fokus pada pelayanan konseling dan konsultasi. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat Surabaya dapat memperoleh informasi, dukungan, dan bimbingan yang diperlukan untuk memperkuat hubungan keluarga, mendidik anak-anak dengan baik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan positif.

Layanan yang disediakan oleh Puspaga Balai RW mencakup beragam aspek kehidupan keluarga. Misalnya, kelas-kelas parenting memberikan pemahaman dan keterampilan kepada orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Konseling disediakan untuk membantu keluarga mengatasi berbagai masalah, mulai dari konflik antaranggota keluarga hingga masalah perkawinan. Edukasi tentang topik-topik seperti kesehatan reproduksi, pendidikan anak, dan kesejahteraan keluarga juga menjadi bagian integral dari program ini.

Salah satu aspek menarik dari Puspaga Balai RW adalah kolaborasinya dengan perguruan tinggi di Surabaya. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai wadah bagi mahasiswa yang tertarik untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Mahasiswa yang ingin menjadi konselor atau relawan dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan bersama universitas-universitas terkemuka di Surabaya. Hal ini memberikan peluang bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman praktis dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh di dalam kelas.

Kerjasama antara Puspaga Balai RW dan perguruan tinggi menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Di satu sisi, program ini mendapatkan dukungan dan kontribusi dari para mahasiswa yang penuh semangat dan bersemangat. Di sisi lain, mahasiswa mendapatkan pengalaman lapangan yang berharga dan peluang untuk berkontribusi secara nyata pada masyarakat. Ini tidak hanya membantu pengembangan program, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan kolaboratif.

Secara keseluruhan, Puspaga Balai RW menjadi wahana penting dalam upaya pemerintah Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Melalui pelayanan konseling, edukasi, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi, program ini memberikan dampak positif yang signifikan dalam menciptakan

lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat bagi semua lapisan masyarakat Surabaya.

## Penelitian Terdahulu

Bagian ini menguraikan hasil penelitian terdahulu yang membandingkan dan mengontraskan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian ini berkaitan dengan collaborative governance terkait pembangunan infrastruktur kepemudaan, khususnya Youth Space di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Melalui analisis literatur, ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, dan penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan hasilnya akan diuraikan berikut ini.

Salah satu penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian Amran (2020) yang membahas pengaruh collaborative governance dan koordinasi terhadap kinerja organisasi dalam pembangunan infrastruktur umum di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode explanatory survey dengan pendekatan kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa collaborative governance dan koordinasi secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi di Kota Bekasi.

Meskipun fokusnya berbeda, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Amran (2020) dalam hal pendekatan kuantitatif. Namun, perbedaan muncul pada objek penelitian, metode penelitian, dan teori yang digunakan. Penelitian Amran (2020) menggunakan teori collaborative governance menurut Balogh, sementara peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan teori collaborative governance assesement menurut Ratner.

Selanjutnya, penelitian Restu A. Paripurnawaty (2021) mengenai collaborative governance dalam pengelolaan Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) di Kota Bandung. Restu menggunakan teori collaborative governance menurut Ansell dan Gash dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Meskipun fokusnya berbeda dengan penelitian ini, terdapat kesamaan dalam menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

Penelitian Andre Ariesmansyah (2019) tentang collaborative governance pada Program Creative Belt di Kota Bandung juga relevan. Andre menggunakan teori collaborative governance menurut De Seve dengan metode kualitatif dan parameter operasional untuk mengukur kolaborasi. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus collaborative governance dan metode deskriptif kualitatif. Namun, perbedaan muncul pada teori yang digunakan dan objek penelitian.

Terakhir, penelitian Andriani (2019) membahas collaborative governance dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong. Andriani menggunakan teori collaborative governance dari Emerson dan Nabatchi dengan metode deskriptif kualitatif. Kesamaan terdapat pada fokus collaborative governance dan metode deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaan muncul pada teori yang digunakan dan objek penelitian.

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat variasi dalam fokus, metode, dan teori yang digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu, namun terdapat persamaan penting dalam pemilihan pendekatan

kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami dan menggambarkan collaborative governance. Perbedaan tersebut memberikan nilai tambah dalam memperkaya perspektif dan kontribusi pengetahuan terkait collaborative governance dalam konteks infrastruktur kepemudaan. Penelitian ini, dengan menggunakan teori collaborative governance assesement menurut Ratner, akan memberikan pandangan yang holistik dan mendalam terhadap collaborative governance dalam konteks Youth Space di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Metodologi kualitatif dipilih karena memberikan ruang bagi pemahaman mendalam tentang konsep-konsep dan fenomena yang akan diteliti. Proses studi literatur akan melibatkan analisis kritis terhadap sumber-sumber teoritis yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademis. Langkah pertama melibatkan identifikasi dan seleksi sumber-sumber yang memiliki relevansi tinggi dengan tujuan penelitian. Setelah itu, akan dilakukan analisis mendalam terhadap konsep-konsep kunci, temuan, dan kerangka pemikiran yang muncul dari literatur tersebut.

Dalam konteks studi literatur, peneliti akan memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai isu atau topik yang diteliti. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali gagasan, pandangan, dan temuan yang mungkin tidak terungkap melalui data kuantitatif saja. Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif, di mana pola-pola dan tema-tema akan muncul dari literatur yang telah direview. Keberhasilan penelitian ini akan tergantung pada kemampuan peneliti dalam mengidentifikasi keterkaitan antara berbagai sumber literatur dan menyusun pemahaman yang holistik terhadap isu yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Model Kolaborasi dalam Program Puspaga Balai RW:**

Dalam sub-pembahasan ini, akan terfokus pada berbagai model kolaborasi yang dapat diterapkan antara aktor-aktor yang terlibat dalam program Puspaga Balai RW. Pemilihan model kolaborasi yang tepat menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan program ini, dan berbagai pendekatan dapat menjadi landasan diskusi.

Pertama-tama, pengorganisasian partisipatif menjadi model yang signifikan dalam program Puspaga Balai RW. Program ini secara aktif melibatkan warga, pemerintah setempat, dan pihak swasta dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program secara partisipatif. Diskusi dapat merinci bagaimana ketiga pihak tersebut bersinergi dalam mengidentifikasi masalah, menemukan solusi yang sesuai, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Penting untuk mendalami cara kolaborasi ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi program Puspaga Balai RW.

Selanjutnya, jaringan kemitraan menjadi model kolaborasi yang signifikan dalam memperkuat pelaksanaan program Puspaga Balai RW. Program ini membangun jaringan kemitraan antara berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah,

lembaga swadaya masyarakat, dan sektor bisnis. Diskusi dapat mengulas analisis dampak dan manfaat dari setiap mitra, serta mencermati cara pengelolaan konflik dan pengaturan kerjasama yang efektif. Penekanan pada keberlanjutan dan keberlanjutan program melalui kerjasama aktor-aktor ini dapat menjadi bagian integral dari pembahasan.

Selain itu, manajemen risiko bersama menjadi aspek penting dalam program Puspaga Balai RW. Aktor-aktor terlibat perlu bersama-sama mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan pelaksanaan program. Diskusi dapat memfokuskan pada strategi mitigasi risiko yang dapat diterapkan bersama untuk meminimalkan dampak negatif pada pelaksanaan program. Pengelolaan risiko yang efektif akan memastikan kesinambungan program dan menjaga keberlanjutan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam rangka menganalisis keberhasilan kolaborasi antara berbagai aktor dalam program Puspaga Balai RW, perlu dipahami bagaimana mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Evaluasi kinerja kolaboratif, pembelajaran dari pengalaman sebelumnya, dan upaya bersama untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dapat menjadi aspek penting dalam diskusi ini. Keberhasilan program ini tidak hanya terletak pada konsep kolaboratifnya tetapi juga pada implementasi praktis dan dampak positif yang dapat dihasilkan bagi masyarakat lokal.

## **Hambatan dan Tantangan dalam Kolaborative Governance:**

Dalam kerangka kolaborative governance untuk program Puspaga Balai RW, ada sejumlah hambatan dan tantangan yang dapat dihadapi oleh aktor-aktor yang terlibat. Pembahasan akan mencakup beberapa aspek utama yang dapat merinci dan mengatasi tantangan tersebut.

Pertama-tama, perbedaan visi dan tujuan antara pihak-pihak yang terlibat dapat menjadi sumber konflik. Kolaborative governance memiliki potensi untuk menyatukan pandangan yang berbeda dan mencapai konsensus. Penting untuk meninjau konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan visi dan tujuan tersebut. Diskusi mendalam dapat membantu menciptakan pemahaman bersama dan mengarah pada kesepakatan yang menguntungkan semua pihak terlibat.

Selanjutnya, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan maupun sumber daya manusia, dapat menjadi tantangan signifikan. Diskusi dapat mencakup strategi untuk mengatasi atau mengelola keterbatasan sumber daya dengan efisien, sehingga dapat menjaga kelangsungan program. Penekanan pada inovasi dalam pengelolaan sumber daya, seperti pencarian alternatif pendanaan dan optimalisasi tenaga kerja, menjadi bagian integral dari diskusi ini.

Masalah komunikasi juga dapat menjadi hambatan dalam kolaborative governance. Penting untuk menitikberatkan pada pentingnya komunikasi yang efektif antara semua aktor terlibat. Diskusi dapat melibatkan analisis masalah-masalah komunikasi yang mungkin muncul dan merumuskan strategi untuk meningkatkan transparansi dan pertukaran informasi di antara semua pihak terlibat. Pembahasan ini akan membantu menciptakan lingkungan di mana setiap aktor merasa didengar dan terlibat secara aktif dalam proses kolaborasi.

Dalam mengatasi hambatan dan tantangan ini, perlu membangun mekanisme kolaborasi yang inklusif. Diskusi dapat merinci langkah-langkah konkrit untuk memfasilitasi dialog terbuka dan mempromosikan pertukaran informasi yang transparan di antara semua pihak terlibat. Menciptakan platform untuk berbagi ide, pengalaman, dan pandangan dapat menguatkan kolaborasi dan menciptakan keberlanjutan dalam implementasi program Puspaga Balai RW.

Sebagai kesimpulan, mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi hambatan serta tantangan dalam konteks kolaborative governance merupakan langkah krusial. Diskusi yang mendalam dan solutif akan menjadi landasan kuat untuk mengoptimalkan potensi kolaborasi dan memastikan kesuksesan program Puspaga Balai RW dalam mencapai tujuan bersama.

## KESIMPULAN

Dalam sub-pembahasan ini, berbagai model kolaborasi untuk program Puspaga Balai RW, seperti pengorganisasian partisipatif, jaringan kemitraan, dan manajemen risiko bersama, diulas secara rinci. Pemilihan model kolaborasi yang tepat menjadi kunci keberhasilan program ini, menggambarkan pentingnya kerjasama aktor-aktor terlibat. Evaluasi kinerja kolaboratif, pembelajaran dari pengalaman sebelumnya, dan upaya bersama untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi menjadi fokus diskusi. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada konsep kolaboratifnya, tetapi juga pada implementasi praktis dan dampak positifnya bagi masyarakat.

Sementara itu, dalam konteks kolaborative governance untuk program Puspaga Balai RW, hambatan dan tantangan seperti perbedaan visi, keterbatasan sumber daya, dan masalah komunikasi dibahas secara mendalam. Diskusi merinci strategi mengatasi perbedaan pandangan dan mencari solusi efisien terkait sumber daya. Pentingnya komunikasi efektif dan mekanisme kolaborasi inklusif ditekankan sebagai langkah utama untuk mengatasi tantangan. Keseluruhan, diskusi yang mendalam dan solutif menjadi landasan kuat untuk mengoptimalkan potensi kolaborasi dan memastikan kesuksesan program Puspaga Balai RW dalam mencapai tujuan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Paripurnawaty. (2021). Tata Kelola Kolaboratif: (Collaborative Governance) Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan.
- Amran. (2020). Pengaruh Collaborative Governance dan Koordinasi terhadap Kinerja Organisasi pada Proses Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum di Kota Bekasi. Disertasi. Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana, Universitas Pasundan, Bandung.
- Andriani. (2019). Collaborative Governance dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong. Skripsi. Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Ariesmansyah, A. (2019). Collaborative Governance pada Program Creative Belt di Kota Bandung. Tesis. Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Pasca Sarjana, Universitas Pasundan, Bandung.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. Georgetown University Press.
- Irawan, E. (2017). Collaborative governance: Konsep, teori, dan aplikasi. *Jurnal Bina Praja*, 9(1), 1-12.
- Paripurnawaty, R. A. (2021). Model Collaborative Governance Pengelolaan Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Tesis. Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Pascasarjana, Universitas Pasundan, Bandung.
- Ratner, B. D. (2012). Collaborative governance in the public sector. Georgetown University Press.
- Restu A. Paripurnawaty, NPM. 198010025 (2022) Model Collaborative Governance Pengelolaan Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.